

# TEORI KONTRAK Perspektif Muamalah Maliyah

Memahami konsep dasar kontrak atau dalam perspektif fikih muamalah/hukum ekonomi syariah dikenal dengan istilah akad adalah kunci untuk menjalankan perikatan/transaksi kebendaaan (muamalah maliyah) dengan penuh kehati-hatian dan berlandaskan prinsip-prinsip hukum Islam.

Buku ini bukan hanya sekadar menguraikan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur kontrak/akad muamalah maliyah, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam tentang konsep akad, rukun dan syarat-syarat sahnya akad termasuk jenis-jenis kontrak atau akad yang legal dan kontrak yang illegal dalam hukum Islam serta tanggung jawab dan hak-hak yang terkait dengan pelaksanaan akad tersebut. Pembahasan tentang kontrak dan implementasinya dalam berbagai sektor dibahas secara mendalam, baik sektor perdagangan, sektor jasa, dan sektor pertanian.

Buku ini merupakan referensi yang penting pada Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN/IAIN/STAIN serta Perguruan Tinggi Agama, baik Negeri atau swasta di Indonesia. Buku ini sangat diperlukan oleh mahasiswa, dosen, praktisi hukum, dan masyarakat umum yang ingin memahami konsep dasar kontrak/akad dalam konteks muamalah/hukum ekonomi syariah.



PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA  
ANGGOTA IKAPI 041/SBA/2023  
Email : penerbitmafya@gmail.com  
Website : penerbitmafya.com  
FB : Penerbit Mafy



TEORI KONTRAK PERSPEKTIF MUAMALAH MALIYAH

Dr. Aidil Alfin, M.Ag.

# TEORI KONTRAK Perspektif Muamalah Maliyah

Dr. Aidil Alfin, M.Ag.

Editor: Dr. Iiz Izmuddin, M.A.

**TEORI KONTRAK  
PERSPEKTIF  
MUAMALAH MALIYAH**

### Sanksi Pelanggaran Pasal 113

#### Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# **TEORI KONTRAK PERSPEKTIF MUAMALAH MALIYAH**

**Dr. Aidil Alfin, M.Ag.**



# **TEORI KONTRAK PERSPEKTIF MUAMALAH MALIYAH**

Penulis:

**Dr. Aidil Alfin, M.Ag.**

Editor:

**Dr. Iiz Izmuddin, M.A.**

Desainer:

**Tim Mafy**

Sumber Gambar Cover:

**[www.freepik.com](http://www.freepik.com)**

Ukuran:

**vi, 156 hlm., 15,5 cm x 23 cm**

ISBN:

**978-623-8470-65-5**

Cetakan Pertama:

**November 2023**

**Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.**

**PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA**

**ANGGOTA IKAPI 041/SBA/2023**

Kota Solok, Sumatera Barat, Kode Pos 27312

Kontak: 081374311814

Website: [www.penerbitmafya.com](http://www.penerbitmafya.com)

E-mail: [penerbitmafya@gmail.com](mailto:penerbitmafya@gmail.com)

---

# Pengantar Penulis

---

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Selawat dan salam juga kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan teladan dan petunjuk dalam menjalankan ajaran agama Islam.

Dengan penuh keikhlasan, kami dengan bangga mempersembahkan buku ini, yang berjudul "Teori Kontrak Perspektif Muamamah Maliyah". Buku ini adalah produk kerja keras penulis yang memiliki pemahaman mendalam dalam bidang hukum Islam dan praktik muamalah.

Buku ini merupakan bahan bacaan yang penting bagi para mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum yang ingin memahami konsep dasar akad dalam konteks muamalah/Huukum Ekonomi Syariah. Dalam buku ini, kami mengupas tuntas teori kontrak atau akad dan penerapannya dalam berbagai aspek transaksi dan perjanjian/perikatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Buku ini bukan hanya sekedar menguraikan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur akad-akad muamalah, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam tentang konsep akad, rukun dan syarat-syarat sahnya akad termasuk jenis-jenis kontrak yang

diakui/legal dan kontrak yang illegal dalam hukum Islam serta tanggung jawab dan hak-hak yang terkait dengan pelaksanaan akad tersebut.

Buku ini juga memberikan perspektif yang dekat dengan prinsip-prinsip syariah, menjadikan pijakan dalam setiap transaksi yang dilakukan. Kami percaya bahwa memahami konsep dasar akad dalam muamalah/ekonomi syariah adalah kunci untuk menjalankan perikatan/transaksi dan perjanjian dengan penuh kehati-hatian dan berlandaskan prinsip-prinsip hukum Islam.

Kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan dalam proses penulisan buku ini. Tanpa bantuan dan kerja sama mereka, buku ini tidak akan terwujud. Terima kasih juga kepada penerbit yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menerbitkan karya ini.

Kami berharap bahwa buku ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi pembaca, bukan hanya sebagai sumber pengetahuan, tetapi juga sebagai panduan praktis dalam menjalankan muamalah/aktivitas ekonomi yang berlandaskan hukum Islam. Kami berharap agar buku ini dapat menjadi salah satu sumbangan kami untuk menebarkan pemahaman dan praktik hukum Islam yang benar dan berkeadilan.

Akhir kata, semoga buku ini dapat menjadi cahaya di tengah gelapnya ketidaktahuan dan praktek yang salah dalam dunia muamalah. Marilah kita bersama-sama belajar dan mengamalkan ajaran agama ini demi menyebarkan kebaikan dan keadilan dalam masyarakat kita. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Bukittinggi, 1 November 2023**

**Dr. Aidil Alfin, M.Ag.**

---

# Daftar Isi

---

<b>PENGANTAR PENULIS</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB 1 KONTRAK (AKAD)</b> .....	<b>1</b>
A. Pendahuluan.....	1
B. Pengertian Kontrak.....	2
C. Faktor-Faktor Pembentuk Kontrak/Akad.....	4
D. Jenis Kontrak .....	12
E. Berakhirnya Kontrak .....	18
<b>BAB 2 KONTRAK (AKAD) YANG DIPERBOLEHKAN ...</b>	<b>19</b>
A. Pendahuluan.....	19
B. Sektor Perdagangan Dan Perindustrian.....	21
1. Jual Beli (Bai') .....	21
2. Mudhârabah.....	31
3. Partnership (Syirkah).....	39
C. Sektor Jasa .....	52
1. Sewa-Menyewa/Upah Mengupah (Ijarah) .....	52
2. Pinjam-Meminjam (‘Ariyah).....	64
3. Titipan (Wadî‘ah).....	70
4. Barang Jaminan (Rahn) .....	76
5. Anjak Piutang (Hiwalah) .....	87
6. Makelar (Simsâr).....	96
7. Sayembara (Ji‘alah).....	99

D. Sektor Pertanian.....	104
1. Bagi hasil Pertanian (Al-Muzâra'ah).....	104
2. Kerjasama Pemeliharaan/Perawatan Tanaman (Al- musâqâh) .....	114
3. Paroan Lahan (Al-Mughârasah) .....	122
<b>BAB 3 KONTRAK YANG DILARANG .....</b>	<b>129</b>
A. Pendahuluan.....	129
B. Kontrak Yang Dilarang Secara Khusus .....	130
1. Riba.....	130
2. Perjudian (Maysir/Qimar) .....	135
3. Beberapa Praktek Jual-Beli yang Diharamkan .....	136
C. Kontrak Yang Dilarang Secara Umum .....	142
1. Penganiayaan (Zulm) .....	143
2. Penipuan (Gharar).....	145
<b>INDEKS.....</b>	<b>147</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>151</b>
<b>TENTANG PENULIS .....</b>	<b>155</b>

---

# Pedoman Transliterasi

---

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ا	-	-	ط	tha	th
ب	ba	b	ظ	za	zh
ت	ta	t	ع	'ain	'
ث	sa	ts	غ	ghain	gh
ج	jim	j	ف	fa	f
ح	ha	h	ق	qaf	q
خ	kha	kh	ك	kaf	k
د	dal	d	ل	lam	l
ذ	zal	z	م	mim	m
ر	ra	r	ن	nun	n
ز	za	z	و	wau	w
س	sin	s	ه	ha'	h
ش	syin	sy	ء	hamzah	'
ص	Sad	sh	ي	ya	y
ض	dad	dh	ة	ta	h

Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia terdiri dari :

1. Vokal tunggal yang berupa tanda atau harakat transliterasinya adalah ;

ـَ (fathah) dilambangkan dengan : a

ـِ (kasrah) dilambangkan dengan : i

ـُ (dammah) dilambangkan dengan : u

2. Vokal rangkap atau maddah dilambangkan sebagai berikut ;

أ atau ى = â

ي = î

و = û

Contoh : قَالَ = qâla رَمَى = ramâ

يَقُولُ = yaqûlu قِيلَ = qîla

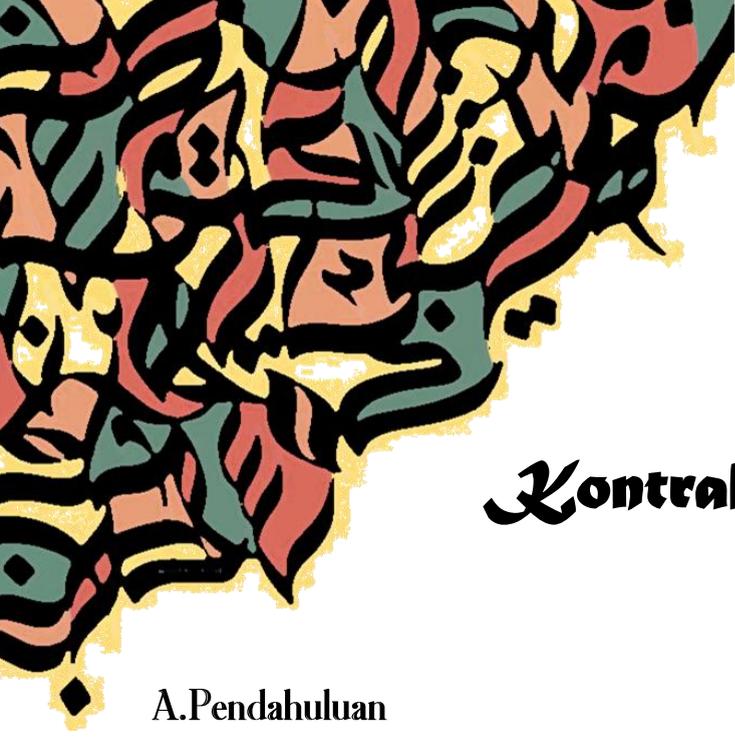
3. Syaddah (tasydid) dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah, contoh :

رَبَّنَا = rabbanâ نَزَّلَ = nazzala أَلْبِرُّ = al-birr

4. Kata sandang yang diikuti baik oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang, contoh :

أَلْتَعْدِيلُ = al-ta'dîl

أَلْجَرْحُ = al-jarh



# Bab 1

## Kontrak (Akad)

### A. Pendahuluan

---

Sebagai makhluk sosial manusia sangat memerlukan keberadaan orang sekitarnya. Sikap anti sosial merupakan sikap yang tidak saja mendatangkan kerugian tapi juga merusak tatanan kehidupan masyarakat itu sendiri. Di antara sikap anti sosial yang identik dengan kemoderenan adalah materialisme dan individualisme. Memang tidak dinafikan bahwa manusia memerlukan materi untuk dapat hidup, dan untuk mendapatkan materi tersebut kompetisi merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan. Sebab sumber alam bersifat terbatas, sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Apabila tidak ada *role of law* (aturan hukum) yang jelas dalam memanfaatkan atau mengeksploitasinya, maka akan terjadi *chaos* karena pertentangan kepentingan.

Di samping itu, manusia dengan kebutuhan yang tidak terbatas senantiasa tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Apa yang dibutuhkannya tidak selamanya dia miliki, terkadang berada di tangan orang lain atau di bawah penguasaan orang lain. Untuk memenuhi kebutuhannya terhadap barang yang dimiliki orang lain tersebut, hanya ada dua alternatif ; merampas secara paksa atau melalui cara damai, seperti meminta, meminjam atau membeli. Cara yang pertama akan mengakibatkan dia berhadapan dengan tindakan

hukum, karena merampas barang orang lain adalah tindakan pidana (illegal). Sedangkan cara yang kedua merupakan cara yang diakui oleh masyarakat dan syari'ah sebagai cara pemenuhan kebutuhan

yang legal. Cara kedua ini dalam perspektif hukum Islam disebut akad atau dalam perspektif hukum konvensional disebut kontrak. Pada umumnya sebuah kontrak merupakan cara yang paling efektif untuk mengakuisisi kepemilikan dan pemindahan harta.

Akad atau kontrak merupakan titik sentral dalam membincang hukum ekonomi Islam. Kesahihan sebuah transaksi dapat diukur dari bentuk kontrak/akadnya. Syari'at telah membagi akad kepada dua bentuk dari segi kesahihannya, yaitu akad yang dibolehkan dan akad yang tidak dibolehkan. Setidaknya ada 25 akad yang dibolehkan oleh syara' seperti; jual beli (*bai'*), sewa-menyewa (*ijârah*), runguhan (*rahn*), perwakilan (*wakalah*), perserikatan (*syirkah*), kerjasama perdagangan (*mudhârabah*), kerjasama dalam pertanian (*muzâra'ah* dan *musâqâh*), pinjam-meminjam (*i'ârah*), pengalihan hutang (*hiwâlah*), hibah dan sebagainya. Semua bentuk aktifitas ekonomi di atas dihalalkan oleh Allah Swt. Sedangkan akad yang tidak dibolehkan syara' pada dasarnya disebabkan akad tersebut mengandung kezaliman dan penipuan, seperti riba, perjudian dan beberapa kontrak jual beli yang keluar dari koridor syari'ah.

Dalam kajian ini akan dijelaskan tentang konsep akad dilihat dari segi definisi, apa saja faktor yang membentuk kontrak, jenis kontrak dan faktor-faktor yang menyebabkan berakhirnya sebuah kontrak.

## B. Pengertian Kontrak

---

Dalam hukum Islam istilah kontrak lazimnya disebut dengan akad. Adapun pengertian akad secara etimologis dapat ditelusuri dari asal kata itu sendiri yang berasal dari bahasa Arab *'aqd*, artinya ikatan, perjanjian, atau permufakatan.<sup>1</sup> Dalam kamus Lisan al-Arabi disebutkan " *'aqd al-ahd*" yang berarti membuat perjanjian, "*'aqd al-*

---

<sup>1</sup>Al-Fairuzzabadi, *al-Qamus al-Muhith*, (Beirut : Mu'assasah al-Risalah, 1982)

*yamin* ", yang berarti membuat sumpah dan kalimat " *'uqdat al-nikah*" yang berarti persetujuan nikah atau kesepakatan nikah. Dengan demikian kata akad mengandung pengertian perjanjian resmi dan penunaian atau pelaksanaan. Pendek kata, kontrak merupakan sumber kewajiban yang harus dipenuhi, sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

"*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janjimu.*"

Dalam suat al-Isra ayat 4 dinyatakan pula :

...واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا

"Penuhilah Janjimu, sesungguhnya janji pasti diminta pertanggung jawabannya.

Secara terminologis terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang pengertian akad/kontrak. Sebagian ulama mendefinisikan dalam skop yang luas dan sebagian lagi mencoba membatasi pengertiannya. Abu Bakar al-Razi misalnya, mendefinisikan akad secara luas, yaitu meliputi setiap perbuatan yang dapat menimbulkan perikatan, baik antara dua pihak atau sepihak.<sup>2</sup> Berdasarkan definisi ini akad tidak mesti lahir dari tindakan dua pihak, seperti jual-beli, sewa-menyewa dan sebagainya, akan tetapi akad juga dapat terjadi dengan tindakan sepihak, misalnya pengguguran hutang, wasiat, talak dan lain-lain.

Sebagian ulama fikih, berpendapat bahwa kontrak adalah perpaduan antara penawaran (ijab) dan penerimaan (qabul) yang dinyatakan sebagai kewajiban dan perjanjian antara dua pihak yang mengadakan kontrak atas suatu hal.<sup>3</sup> Seandainya tindakan tersebut hanya dilakukan sepihak, maka bukan dinamakan akad sekalipun mempunyai akibat hukum.

---

<sup>2</sup>Al-Jassas , *Ahkam al-Quran*, (Kairo: Mathba'ah al-Bahiyah, 1347 H), jil. II, h.294

<sup>3</sup>*Majjallah al-Ahkam Al-Adliyah*, artikel 103-104. Ibn Abidin, *Hasyiah Radd al-Mukhtar*, (Kairo : al-Babi al-Halabi, 1966), jil. II, h. 355

Pengertian akad atau kontrak yang dikenal dalam hukum konvensional (hukum manusia) memiliki perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan pengertian akad dalam perspektif syaria'h. Menurut hukum konvensional definisi kontrak adalah persetujuan antara dua pihak untuk memulai suatu hal atau peristiwa yang mempunyai akibat hukum, baik dalam bentuk menetapkan, memindahkan, merubahnya atau mengakhiri sebuah perjanjian.<sup>4</sup> Dalam hukum Islam kontrak hanya untuk memulai suatu hal, sedangkan segala modifikasi dan pembatalan bukan termasuk kontrak tetapi konsekwensi dari kontrak itu yang telah berdasarkan jenis kontrak itu. Artinya segala konsekwensi dari akad adalah termasuk ke dalam akad itu sendiri dalam hukum Islam.

Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini kontrak perserikatan/ syirkah ( partnership ). Dalam hukum ekonomi Islam telah ditetapkan rukun dan syarat serta faktor-faktor yang menyebabkan berakhirnya kontrak sewa-menyewa. Oleh karena itu, segala bentuk modifikasi atau perubahan, dan transfer atau pemindahan kekuasaan dalam syirkah yang keluar dari rukun dan syarat kontrak syirkah dapat menyebabkan kontrak syirkah menjadi rusak (fasid) bahkan batal. Sedangkan dalam hukum konvensional, perubahan dan transfer kepemilikan dalam syirkah merupakan kontrak-kontrak tersendiri/sampingan sebagai pendukung kontrak yang utama.

## C. Faktor-Faktor Pembentuk Kontrak/Akad

---

### 1. Rukun Akad

Akad terbentuk dari penawaran (ijab) dan penerimaan (qabul). Ijab dan qabul dalam istilah fikih disebut shighat akad atau lafaz akad. Shighat akad adalah penggambaran tentang kehendak untuk melakukan transaksi yang terwujud melalui lafaz ijab dan qabul.<sup>5</sup> Lafaz akad hanya akan terealisasi dengan adanya orang yang memulai penawaran (*mu'jib*), orang yang menerima tawaran (*qabil*), benda

---

<sup>4</sup>Abd al-Raza' al-Sanhuri, *al-Wajiz fi Sharh al-Qanun al-Madani*, juz I, h.73

<sup>5</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamî wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M), h. 348

yang ditawarkan (*mahal al-aqd*). Berdasarkan hal itu ulama Hanafiyah menetapkan bahwa rukun akad adalah shighat atau lafaz akad itu sendiri yang terdiri dari ijab dan qabul. Sedangkan faktor-faktor lain yang membentuk shighat akad tersebut mereka kategorikan sebagai syarat akad.<sup>6</sup>

Sedangkan Jumhur fukahak berpendapat bahwa rukun akad terdiri dari dua pihak yang berakad (*mujib* dan *qabil*), shighat akad (ijab dan qabul) dan benda yang menjadi objek akad. Misalnya dalam kontrak atau akad jual beli, dalam pandangan ulama Hanafiyah rukun jual beli tersebut hanyalah *shighat aqad*, yaitu lafaz ijab dan qabul yang menunjukkan kehendak untuk melakukan transaksi jual beli. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun jual beli secara umum ada tiga (bila dirinci ada 6), yaitu:<sup>7</sup>

- 1) Kedua belah pihak yang melakukan transaksi ( *'aqidain*), terdiri dari penjual dan pembeli.
- 2) Objek jual beli (*ma'qûd 'alaih*), terdiri dari komoditi dan nilai tukar (harganya).
- 3) Shîghat akad, yang terdiri dari lafaz ijab dan qabul.

Apabila dilihat perbedaan pendapat tentang rukun kontrak di atas dari segi faktor pembentuk kontrak, sebenarnya perbedaan itu hanya dalam tataran teoritis saja, bukan dalam tataran praktis. Sebab secara teoritis kontrak hanya akan terbentuk dengan persetujuan dua pihak melalui shighat akad. Namun dalam tataran praktis, shighat tidak mungkin terealisasi tanpa keberadaan kedua pihak dan objek akad itu sendiri.

## 2. Syarat-Syarat Kontrak

Syarat-syarat kontrak ada yang bersifat umum dan ada yang khusus. Syarat umum kontrak maksudnya syarat yang mesti dipenuhi

---

<sup>6</sup> Ibn Abidin, Rukun menurut ulama Hanafiyah adalah sesuatu yang tergantung atasnya keberadaan sesuatu yang lain dan dia merupakan bahagian dari sesuatu tersebut. Adapun syarat adalah sesuatu yang tergantung atasnya keberadaan sesuatu yang lain dan dia tidak merupakan- bahagian dari sesuatu tersebut. Sedangkan menurut Jumhur Ulama rukun adalah sesuatu yang tergantung atasnya sesuatu yang lain, baik dia merupakan bahagian dari sesuatu tersebut atau tidak. Wahbah al-Zuhailî, h. 347

<sup>7</sup> Wahbah al-Zuhailî, h. 347-348

dalam segala bentuk akad. Sedangkan syarat khusus kontrak adalah persyaratan yang mesti dipenuhi tergantung kepada bentuk dan macam akad/kontrak. Dalam hal ini syarat khusus kontrak jual beli berbeda dengan kontrak ijarah, syarat khusus kontrak mudharabah berbeda dengan kontrak ji'alah, dan seterusnya.<sup>8</sup> Selanjutnya akan dijelaskan syarat umum kontrak berdasarkan rukun yang telah ditetapkan oleh Jumhur fukahak.

#### **a. Syarat Shighat Akad (Ijab dan Qabul)**

Shighat akad dianggap sah dan mempunyai pengaruh dalam kontrak jika memenuhi beberapa syarat berikut.

- 1) Ungkapan penawaran dan penerimaan mestilah menggambarkan secara jelas kehendak kedua belah pihak yang melakukan kontrak. Untuk itu pihak yang ingin melakukan akad atau kontrak haruslah mempunyai kelayakan (ahliyyah) untuk melakukannya. Secara umumnya seseorang itu dinyatakan mempunyai kelayakan untuk melakukan akad jika dia seorang yang waras dan tidak cacat akalnya serta memahami segala perbuatan yang dilakukannya. Akad yang dilakukan oleh seorang yang gila atau orang yang sedang tidur, adalah tidak sah.

Syarat ini dibuat kerana akad merupakan ikatan antara dua kehendak. Kehendak dua pihak ini mungkin tidak dapat difahami sekiranya dinyatakan oleh seorang yang tidak dapat menjelaskan kehendaknya sama sekali seperti orang gila atau orang yang sedang tidur. Oleh karena itu, kehendak seseorang itu perlu digambarkan dengan jelas yang menunjukkan keinginannya untuk berakad atau berkontrak.<sup>9</sup>

- 2) Penerimaan (qabul) harus bersesuaian dengan penawaran (ijab). Artinya, penerimaan dan tawaran itu mempunyai tujuan

---

<sup>8</sup>Syarat khusus akad menurut bentuknya dapat dilihat pada bab III dan IV.

<sup>9</sup> Al-Kasani, *Bada-i' al-Shana-i' fi Tartib al-Syara-i'*, (Kairo: Mathba'ah al-Jamâliyah, 1328 H), jil.V, h. 136. Muhammad Khatîb Syarbainî, *Mughnî al-Muhtaj*, (Beirut : Dâr al-Fikri, t.th), jil. II, h. 5

yang sama, objek yang sama dan kuantitas dan kualitas yang sama. Misalnya Amin menawarkan mobilnya kepada Ahmad dengan harga 50 juta Rupiah dan Ahmad menerima tawaran tersebut dengan harga yang disebutkan. Oleh karena itu, tidaklah disebut sesuai antara ijab dan qabul bila aspek-aspek yang dinyatakan dalam penawaran/ijab berbeda dengan penerimaan/qabul. Misalnya dalam kasus di atas, Ahmad menerima tawaran Amin dengan harga 45 juta Rupiah. Di sini terjadi perbedaan lafaz shighat yang menyebabkan kontrak tidak terjadi. Kecuali penerimaan tersebut lebih baik dari penawaran, misalnya Ahmad menerima tawaran untuk membeli mobil Amin seharga 55 juta rupiah, maka akad tersebut sah, karena hakikatnya telah ada persetujuan kedua belah pihak.

Begitu juga sebaliknya, akad dinyatakan sah bila Ahmad menawar untuk membeli mobil Amin dengan harga 50 juta rupiah dan Amin bersedia menjualnya dengan harga yang lebih rendah, misalnya 40 juta rupiah.

- 3) Masing-masing pihak yang berakad saling memahami kehendak pihak yang lain. Artinya, setiap tawaran dan penerimaan yang dibuat boleh dipahami oleh pihak yang terlibat kerana kephahaman inilah yang menjadi prinsip kepada ikatan kehendak mereka yang tersirat. Untuk melahirkan niat yang ada dalam hati pihak yang berkontrak, suatu cara yang boleh menerangkan kehendak tersebut diperlukan, iaitu secara jelas dan boleh dipahami oleh semua pihak.
- 4) Adanya kesinambungan antara ijab dengan qabul. Maksudnya, penerimaan hendaklah dilakukan dalam majlis yang sama (ittihad al-majlis akad), tanpa diselingi oleh hal-hal yang merubah atau memalingkan makna ijab. Ini sekiranya kedua-dua pihak yang melakukan akad atau kontrak itu berada di dalam satu majlis atau di tempat yang sama. Tetapi, jika pihak penerima berada di tempat lain, dia dapat memberitahu penerimaannya sesudah berita mengenai tawaran itu sampai kepadanya. Namun dalam hal ini, terjadi *ikhtilaf* di kalangan

fuqahak berkaitan dengan maksud sebenar kesinambungan antara ijab dengan qabul ini. Menurut jumhur,<sup>10</sup> penerimaan/qabul dianggap bersambung dengan tawaran jika dilakukan dalam majlis yang sama. Apabila pihak pertama membuat tawaran kepada pihak kedua, sedangkan kedua belah pihak berada dalam majlis yang sama, maka pihak kedua tidak semestinya menyatakan qabul langsung setelah ijab dinyatakan. Dia dapat berpikir atau berdiskusi dengan orang lain terlebih dahulu untuk membuat keputusan, apakah menerima atau menolak tawaran, karena ijab dianggap masih berlaku selama tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa ijab tersebut sudah batal. Menurut mazhab Syafi'i<sup>11</sup>, penerimaan dianggap bersambung apabila dilakukan terus sesudah tawaran dibuat tanpa diselangi oleh perbincangan atau perbuatan yang tidak berkaitan dengan tawaran. Sekiranya penerimaan itu tidak dilakukan secara langsung atau diselangi dengan ucapan atau perbuatan lain yang tidak ada hubungannya dengan penawaran, maka akad atau kontrak tidak sah.

Menurut pendapat yang *rajih* maksud majlis yang sama (*ittihad al-majlis*) ialah tidak mesti kedua belah pihak berada pada tempat yang sama, tetapi boleh berada pada lokasi yang berbeda asalkan komunikasi antara keduanya dapat terjalin dengan lancar, baik melalui surat, wakil, telefon, e-mail dan sebagainya.

### **b. Syarat objek Kontrak**

Sesuatu hal atau benda yang dijadikan objek akad berbedabeda tergantung jenis akad itu. Objek itu mungkin berbentuk material seperti pada akad jual beli, berbentuk manfaat seperti pada akad

---

<sup>10</sup> Al-Kâsâni, h.137. Al-Dardir, *Sharh al-Kabir*, (Kairo, Bulaq, 1381H), jil.III, h.5

<sup>11</sup> Muhammad Khatîb Syarbainî, jil.VI, h.6. Sihâb al-Din al-Ramlî, *Nihâyah al-Muhtâj Ilâ Syarh al-Minhâj*, (Beirut : D â r al- Fikri, 1404/1983), jil.III, h.8

sewa-menyewa dan mungkin juga berbentuk kerja/usaha seperti pada akad upah-mengupah, syirkah, mudârabah dan sebagainya. Untuk sahnya sebuah kontrak, objek kontrak harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Objek kontrak tidak boleh menyalahi kehendak akad itu sendiri dan mestilah benda bernilai di sisi syara'. Sebuah objek akad dianggap menyalahi kehendak akad maksudanya tujuan akad tidak sesuai dengan objkenya. Misalnya kontrak pinjam-meminjam terhadap benda yang habis pakai, seperti meminjam sabun, makanan dan sebagainya. Demikian pula tidak boleh menjadikan sesuatu benda yang tidak bernilai di sisi syarak sebagai objek kontrak, seperti bangkai, minuman keras, babi, anjing dan sebagainya.<sup>12</sup>
- 2) Benda tersebut ada sewaktu akad itu dilakukan atau bisa dihadirkan setelah akad dilakukan. Oleh karena itu, tidak boleh menjadikan burung yang terbang di udara atau binatang yang lepas ke rimba sebagai objek akad. Karena benda tersebut tidak ada dan tidak mungkin dihadirkan setelah akad dilakukan.<sup>13</sup> Begitu juga dengan sesuatu objek yang tidak bisa dipastikan keberadaannya pada masa akan datang tidak boleh dijadikan objek akad. Contohnya menjual anak binatang yang masih dalam kandungan ibunya, atau menjual buah yang masih dalam bentuk putik. Demikianlah pendapat syafi'iyah.

Menurut mazhab Malikiyah<sup>14</sup> sesuatu yang tidak ada pada waktu akad dilakukan boleh dijadikan objek akad dengan syarat benda itu berkemungkinan ada dan akad yang dilakukan itu berbentuk sukarela, seperti hibah, wakaf, dan lain-lain. Akad seperti itu tidak akan menimbulkan masalah kepada pihak-pihak yang berkontrak.

---

<sup>12</sup> Al-Kâsâni, h.140. al-Ramli,jil. II, h. 11. Ibn 'Abidin, jil. IV, h. 3

<sup>13</sup> al-Syarbini al-Khatib, Jil. II, h. 30.

<sup>14</sup>Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujathid wa al-Nihayah al-Muqtashid*, (Kairo: Mathba'ah Jamaliyah, 1393H), jil. II, h.324

Sedangkan ulama Hanbali berpendapat<sup>15</sup>, sesuatu yang tidak ada boleh dijadikan objek akad dengan syarat pihak yang bersangkutan mampu mengadakannya setelah kontrak itu dibuat. Ada atau tidak objek kontrak berkenaan pada waktu kontrak itu dilakukan adalah tidak penting dan tidak menjadi satu syarat, yang penting tidak ada gharar (penipuan) dan benda tersebut dapat diserahkan tepat waktu. Oleh karena itu, akad seperti sewa, gadai, jual beli buah yang masih belum masak adalah sah kerana tidak ada gharar. Larangan Nabi Muhammad s.a.w. dalam hadisnya "*Jangan kamu menjual sesuatu yang tidak ada pada kamu*" bermaksud sesuatu yang tidak mampu diserahkan kepada pihak yang berkenaan dan bukanlah sesuatu yang belum ada.

- 3) Objek akad diketahui oleh para pihak yang berkontrak, baik bentuk atau spesifikasi, jenis, kuantitas, kualitas dan sebagainya. Hal ini bertujuan menghindari perselisihan dikemudian hari disebabkan kejahilan terhadap objek akad tersebut.
- 4) Objek kontrak itu dapat diserahkan kepada pihak-pihak yang berkenaan pada waktu yang ditetapkan. Syarat ini disepakati oleh fuqahak dalam akad yang bersifat imbal balas (*bi 'iwadh*), seperti jual beli, sewa-menyewa dan sebagainya. Sedangkan pada akad yang bersifat sukarela (*bi ghairi 'iwadh*) seperti hibah, penyerahan objek akad tidak dijadikan syarat.

### **c. Syarat Para Pihak Dalam Kontrak**

Dalam perspektif syari'ah tidak semua orang boleh melakukan kontrak. Ada orang yang tidak boleh melakukan akad sama sekali dan tindakan yang dilakukannya tidak sah serta tidak ada akibat hukumnya. Ada orang yang termasuk kategori boleh melakukan beberapa jenis akad tertentu dan tidak boleh melakukan beberapa akad yang lain. Ada pula yang masuk ke

---

<sup>15</sup>Ibn Qudamah, *Al-Mughnî Li ibn Qudâmah*, (Kairo : Maktabah Jumhuriyah al-'Arabiyah, t.t), jil. IV, h. 200

dalam kategori boleh melaksanakan semua jenis kontrak secara mutlak. Segala tindakannya dianggap sah dan melahirkan akibat hukum. Perbedaan kategori ini bergantung kepada sejauh mana mereka mempunyai kecakapan hukum (*ahliyah*) untuk melakukan akad atau kontrak.

Dalam syari'at Islam, untuk mewujudkan kontrak yang sah, disyaratkan pihak yang terlibat itu cakap bertindak hukum. Dalam istilah fikih kecakapan atau kelayakan terbagi kepada dua, yaitu:

- 1) Cakap untuk menerima (*أهلية الوجوب*), maksudnya seseorang itu layak menerima segala hak dan tanggung jawab syara'.<sup>16</sup> Dengan adanya kelayakan ini, seseorang itu sudah boleh menerima segala hak dan kewajiban yang ditentukan oleh syara` untuknya. Kelayakan ini dimiliki oleh setiap manusia yang hidup, baik dewasa, anak-anak, atau bayi yang baru lahir. Mereka memiliki kelayakan ini kerana prinsip bagi kelayakan ini ialah manusia yang hidup.
- 2) Cakap untuk melaksanakan (*أهلية الأداء*), maksudnya kelayakan seseorang untuk melaksanakan atau menunaikan segala hak dan tanggungjawab yang diberi dan ditetapkan oleh syara` kepadanya atasnya.<sup>17</sup> Artinya, orang yang mempunyai kelayakan ini boleh melakukan akad dan segala tindakan yang dilakukannya akan menimbulkan akibat hukum. Prinsip bagi kelayakan ini ialah berakal atau mumaiyiz. Mumaiyiz berarti seorang yang sudah dapat memahami segala tindakan yang dilakukan dan akibat yang akan timbul dari perbuatannya itu. Inilah yang menjadi fokus pembicaraan dikalangan fuqahak ketika mendiskusikan syarat-syarat pelaku kontrak. Berdasarkan hal itu, ulama mensyaratkan beberapa hal terhadap pelaku kontrak yaitu :<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Abdul Karim Zaidan, *al-Madkhal li Dirâsah al-Islamîyah*, (Iskandariyah: Dâr Umar ibn Khathab, 1969), h.312

<sup>17</sup> Abdul Karim Zaidan, h. 313.

<sup>18</sup>Sayid Sabiq, 129. Abdul Hamid Hakim, *Mu'în al-Mubîn*, Jakarta : Bulan Bintang,1976), juz.III, h.6-7. Wahbah al-Zuhailî, h.384, 398. Nasrun Haroen, h.115

- a). Berakal atau *mumayyiz*. Tidak sah kontrak yang dilakukan oleh orang gila, orang mabuk, anak kecil yang belum mumayyiz, orang yang berada di bawah pengampuan (*sâfih*). Adapun bila transaksi dilakukan oleh anak kecil yang mumayyiz, maka menurut Hanafiyah akadnya sah tapi *mauquf* (tergantung) atas keizinan walinya, bila wali memberi izin maka kontraknya sah, bila tidak kontraknya batal. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad anak kecil yang sudah mumayyiz tersebut tidak sah, baik ada izin dari walinya atau tidak.
- b). Kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak dalam keadaan terpaksa tanpa dasar hukum yang dibenarkan. (*ikrah bighair al-haq*), maksudnya kontrak dilakukan tidak di bawah ancaman. Menurut Jumhur ulama kontrak dalam keadaan terpaksa tanpa alasan yang dibenarkan (*bighair al-haq*) ini batal, menurut Hanafiyah akadnya *mauquf*, sedangkan menurut ulama Malikiyah aqadnya tidak lazim. Adapun kontrak yang dilakukan atas dasar paksaan yang dibenarkan (*ikrah bi al-haq*), seperti seorang pedagang berdasarkan keputusan hakim harus melunasi hutangnya dengan menjual barang dagangannya, atau kebijaksanaan pemerintah yang mewajibkan pedagang menjual komoditi yang mereka simpan ketika terjadi gejolak harga karena terjadi *ihhtikar*, maka sepakat ulama mengatakan kontraknya sah.

## D. Jenis Kontrak

---

Ada bermacam-macam jenis kontrak tergantung dari perspektif mana dia dilihat, di antaranya dari perspektif sifatnya, masa mulai berlakunya, akibat hukumnya, dan jenis akibat hukum yang timbul dari kontrak tersebut.

Untuk lebih jelas akan diuraikan perspektif ini satu persatu.

## 1. Kontrak dari perspektif sifatnya

Dalam syariat Islam, sifat kontrak disebut juga oleh para fuqahak dengan "hukum kontrak". Ketika menjelaskan pengertian hukum kontrak ini ada dua pendapat di kalangan ulama. Yang pertama mendefinisikan hukum kontrak dengan ketentuan yang didasarkan kepada sejauh mana perbuatan itu dibolehkan atau dilarang oleh syarak. Sebuah kontrak dikategorikan halal, jika dibenarkan oleh syarak. Sebaliknya, kontrak itu haram jika dilarang oleh syarak. Sedangkan golongan kedua mendefinisikan hukum kontrak dengan suatu sifat yang diberikan kepada kontrak atau akad berdasarkan sejauh mana akibat hukum yang ditimbulkan oleh sebuah kontrak yang dibuat.<sup>19</sup> Kadangkala kontrak tersebut mengikat kedua belah pihak, kadang hanya sepihak saja. Terkadang kontrak tersebut tidak mempunyai akibat hukum kadang mempunyai akibat hukum. Kontrak yang mempunyai akibat hukum disebut sah dan yang tidak mempunyai akibat hukum disebut batal.

Untuk menjelaskan jenis kontrak ini, akan dilihat dari perspektif atau konsep kedua. Berdasarkan kepada konsep tersebut, kontrak terbagi kepada beberapa jenis, yaitu:

### a. Kontrak yang sah dan tidak sah

Kontrak yang sah ialah kontrak yang memenuhi rukun dan syarat tanpa adanya kecacatan yang merusaknya. Kontrak ini mempunyai akibat hukum di sisi syarak. Sedangkan pengertian kontrak yang tidak sah berbeda ulama. Menurut Jumhur fuqahak kontrak tidak sah disebut juga kontrak yang batal, yaitu kontrak yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya.<sup>20</sup> Sedangkan fuqahak Hanafiyah<sup>21</sup> membagi kontrak yang tidak sah kepada dua, yaitu kontrak batal dan kontrak *fasid*. Kontrak yang batal ialah kontrak yang mempunyai kecacatan pada rukunnya, seperti perjanjian yang dibuat secara tidak betul. Sebagai contoh, lafaz qabul tidak

---

<sup>19</sup>Abdul-Karim Zaidan, h. 365

<sup>20</sup>Ibn Rusyd, jil. II, h. 166

<sup>21</sup>Ibn Abidin, jil. IV, h.104

sesuai dengan lafaz ijab., maka kontrak itu batal dan tidak menimbulkan akibat hukum di sisi syarak. Sedangkan kontrak *fasid* ialah, kontrak yang mempunyai kecacatan pada syarat kontrak dan tidak pada rukunnya. Contohnya, kontrak yang mengandungi syarat-syarat yang bertentangan dengan syarak atau kontrak yang bentuk imbal balasnya tidak jelas. Kontrak-kontrak seperti ini juga tidak menimbulkan akibat hukum dan dapat dibatalkan oleh para-pihak yang berkontrak. Namun demikian, dalam beberapa kondisi, kontrak *fasid* ini dapat menimbulkan akibat hukum seperti dalam kontrak perkawinan yang dibuat tanpa saksi. Menurut pendapat fuqahak Hanafiyah kontrak ini dianggap sebagai kontrak *fasid* tetapi mempunyai akibat hukum seperti ketetapan mahar, wajib idah jika berlaku perceraian, ketetapan nasab anak dan sebagainya.<sup>22</sup>

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa bagi jumhur fuqahak tidak ada perbedaan antara kontrak batal dan kontrak *fasid*, kedua-duanya disebut sebagai kontrak yang tidak sah. Sedangkan fuqaha' Hanafiyah membedakan antara kedua-duanya kerana dalam beberapa keadaan kontrak ini mempunyai akibat hukum.

- b. Kontrak yang dinyatakan sah secara langsung (*العقد النفذ*) dan kontrak yang memerlukan pelulusan (*العقد الموقوف*)

Apabila sebuah kontrak telah selesai dilakukan, maka belum tentu kontrak itu dihukum sah secara langsung. Terkadang kontrak itu memerlukan keizinan pihak tertentu terlebih dahulu barulah sah. Dan terkadang memang tidak memerlukan keizinan pihak lain. Kontrak yang tidak memerlukan keizinan pihak tertentu untuk kesahihannya disebut kontrak yang sah secara langsung (*al-'aqd al-nafaz*), sedangkan kontrak yang memerlukan keizinan pihak tertentu untuk kesahihannya disebut kontrak yang memerlukan pelulusan (*al-'aqd al-mauquf*).<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> AI-Kasani, Jil. V, h. 299.

<sup>23</sup> Wahbah al-Zuhaili, jil. V, h. 240

Sebuah kontrak akan menimbulkan akibat hukum dan mempunyai kekuatan hukum dengan segera jika dilakukan oleh orang yang mempunyai kecakapan bertindak hukum. Kontrak ini tidak memerlukan keizinan dari pihak manapun. Akan tetapi, jika kontrak dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak hukum, maka kontrak itu tidak mempunyai kekuatan hukum sebelum adanya keizinan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Misalnya akad anak kecil yang belum mumayyiz tidak mempunyai akibat hukum sebelum ada keizinan wali. Jika wali tidak mengizinkan maka kontrak itu batal.

c. Kontrak mengikat (lazim) dan tidak mengikat (ghair lazim)

Kontrak yang sah tanpa syarat (*al-'aqd al-nafaz*) terbagi dua, yaitu kontrak yang mengikat dan tidak mengikat. Kontrak yang mengikat ialah kontrak yang tidak boleh *difasakh* atau dibatalkan kecuali dengan persetujuan kedua-dua belah pihak yang berkontrak. Kontrak lazim yang boleh *difasakh* dengan persetujuan kedua belah pihak ini hanya berlaku pada kontrak-kontrak yang tidak mutlak atau disebut juga sebagai kontrak yang boleh difasakh. Sedangkan kontrak-kontrak yang berlaku secara mutlak, tidak bisa dibatalkan sama sekali, walaupun dengan persetujuan kedua belah pihak, seperti kontrak perkawinan, *khulu'* dan sebagainya. Kontrak ini dinamakan kontrak lazim secara mutlak.<sup>24</sup>

Kontrak yang tidak lazim atau yang tidak merugikan disebut juga sebagai kontrak yang dibolehkan (*العقد الجائز*). Kontrak ini dapat di-*fasakh*-kan berdasarkan kehendak salah satu atau kedua pihak tanpa memerlukan persetujuan daripada pihak yang lain, seperti kontrak penitipan barang (*al-wadi'ah*) atau pinjaman-meminjam (*al'arrah*). Dalam kontrak-kontrak ini, kedua belah belah pihak boleh membatalkan kontrak ini kapan saja.

Ada pula sebahagian kontrak yang dianggap tidak lazim bagi satu pihak dan lazim bagi pihak yang lain. Misalnya kontrak gadaian (*al-rahn*). Bagi penggadai, kontrak ini merupakan kontrak lazim. Dia tidak boleh membatalkan kontrak tersebut kecuali dengan

---

<sup>24</sup>Abdul-Karim Zaidan, h. 268

persetujuan pihak pemegang gadai. Bagi pihak pemegang gadai kontrak itu merupakan kontrak yang boleh atau kontrak tidak lazim. Dia boleh membatalkan kontrak tersebut bila saja ia mau.<sup>25</sup>

## 2. Kontrak dari perspektif Mempunyai kekuatan Hukum

Dari perspektif kapan suatu kontrak mulai mempunyai kekuatan hukum, kontrak terbagi beberapa macam:

- a. Kontrak yang mempunyai kekuatan hukum secara langsung (*العقد المنجز*), yaitu kontrak yang langsung mempunyai kekuatan hukum setelah dia dilaksanakan tanpa terikat dengan syarat apapun. Misalnya pada akad jual beli, kontrak ini mempunyai kekuatan hukum semata-mata dengan berlakunya akad, yaitu ijab dan qabul antara kedua belah pihak. Dengan adanya kontrak ini, penjual wajib menyerahkan barang kepada pembeli dan berhak menerima harganya. Sedangkan pembeli wajib menyerahkan harga barang dan berhak memiliki barang tersebut.

Ada pula beberapa jenis kontrak yang baru mempunyai kekuatan hukum setelah syarat-syarat terpenuhi, misalnya kontrak *salam* (jual beli pesanan). Kontrak ini baru mempunyai kekuatan hukum apabila orang yang memesan barang telah menerima barang yang dipesannya.<sup>26</sup>

- b. *Kontrak yang mempunyai kekuatan hukum pada masa yang akan datang*, artinya shighat akad mengandung maksud penangguhan pelaksanaannya pada suatu masa yang disepakati oleh kedua belah pihak. Contohnya, dalam kontrak sewa-menyewa (*ijarah*) para pihak yang berkontrak boleh menentukan tempo mulai mempunyai kekuatan hukumnya perjanjian sewa tersebut. masa yang akan datang Seandainya Rahmat membuat perjanjian untuk menyewakan rumahnya kepada Dahlan mulai bulan depan, maka masa mula mempunyai kekuatan hukumnya perjanjian tersebut ialah pada bulan tersebut. Namun tidak semua kontrak boleh dibuat dalam bentuk ini. Ada sebagian kontrak tidak boleh diundur

---

<sup>25</sup> Abdul-Karim Zaidan, h. 369

<sup>26</sup> Wahbah al-Zuhail, jil. IV, h. 246

kekuatan hukumnya. Dalam masalah ini kontrak terbagi kepada tiga bagian;

- 1) Kontrak yang kekuatan hukumnya berlaku pada masa yang akan datang, seperti kontrak wasiat.
- 2) Kontrak yang tidak boleh ditunda kekuatan hukumnya, seperti kontrak jual beli, perkawinan dan sebagainya.
- 3) Kontrak yang boleh ditunda kekuatan hukumnya seperti kontrak sewaan, pinjaman dan sebagainya.<sup>8</sup>

c. *Kontrak Tergantung (Kontrak Kontijensi)*, artinya kontrak ini bergantung kepada syarat-syarat yang tertentu. Kekuatan hukum kontrak ini bergantung kepada terpenuhinya syarat yang ditentukan pada masa akan datang. Jika syarat yang ditentukan itu ada, kontrak tersebut dianggap berlaku. Misalnya A berkata kepada B, "Apabila saya berangkat keluar negeri maka saya angkat anda sebagai wakil saya di sini". Pengangkatan wakil tersebut tidak berlaku kecuali setelah A berada di luar negeri.

### **3. Kontrak dari perspektif manfaatnya**

Dari segi manfaat yang dirasakan oleh kedua belah pihak, kontrak terbagi dua, yaitu:

- a. Kontrak *mu'awadhah* (komersial) atau kontrak timbal balik, yaitu kontrak yang manfaatnya dapat dirasakan secara materiil oleh kedua belah pihak. Misalnya dalam akad jual beli, penjual dapat menerima manfaat dalam bentuk uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan pembeli dapat menerima manfaat dalam bentuk barang yang dibutuhkannya. Hal yang sama dapat pula dilihat dalam akad sewa menyewa, pihak penyewa menerima manfaat dari barang yang disewa, manakala pihak yang menyewakan memperoleh sejumlah imbalan (uang sewa).
- b. Kontrak *tabarru'* (sosial), yaitu kontrak yang manfaatnya secara materiil hanya dinikmati oleh satu pihak, sedangkan pihak lain melakukan kontrak semata-mata untuk berbuat baik. Misalnya kontrak hibah dan pinjam-meminjam. Dalam kedua kontrak di atas, baik pemberi hibah atau pemberi pinjaman tidak mengharapkan balasan apa-apa secara materiil, kecuali hanya

untuk berbuat baik. Selain itu, akad wakalah (perwakilan) dan kafalah (penjaminan) juga digolongkan sebagai akad *tabarru'*. Walaupun dalam perkembangannya kemudian kedua akad ini bisa berubah menjadi akad komersial, yaitu dengan adanya uang jasa (fee/upah) yang dibebankan kepada pihak yang memberi perwakilan.

## E. Berakhirnya Kontrak

---

Ada beberapa faktor yang menyebabkan berakhirnya sebuah kontrak, yaitu:<sup>27</sup>

1. Pembatalan karena akad rusak (fasid).
2. Pembatalan akad melalui khiyar (hak opsi).
3. Pembatalan akad berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (*iqâlah*).
4. Salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan.
5. Berakhirnya masa kontrak atau tercapainya tujuan dari akad.
6. Kematian salah satu atau kedua pihak yang berakad dapat membatalkan akad dalam pandangan Hanafiyah.
7. Batalnya kontrak karena tidak ada izin pihak berwenang pada akad mauquf.

---

<sup>27</sup>Wahbah al-Zuhaili, jil. IV, h. 276-280